

**TATA KELOLA DINAS PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN
JENEPONTO**

Disusun dan Diusulkan Oleh

WISDAM NOFANDA GUNAWAN

Nomor Stambuk :105641117616



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

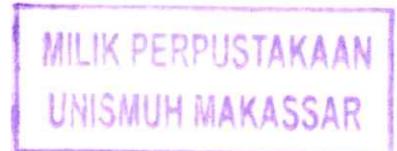
2020

**TATA KELOLA DINAS PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KABUPATEN
JENEPONTO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan



Disusun dan Diajukan Oleh

WISDAM NOFANDA GUNAWAN

Nomor Stambuk :105641117616

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
	FAKULTAS PERPUSTAKAAN & PENERBITAN
	Tanggal terima : 03/09/2021
Kepada	Jumlah surat : 1 exp
	Tempo exp. : Semb. Alumni
	Nomor induk : —
	Klasifikasi : R/0090/IPM/21 CD
	GUN
	t'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Tata Kelola Dinas Pendidikan di Masa Pandemi
Covid-19 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
Dikabupaten Jeneponto

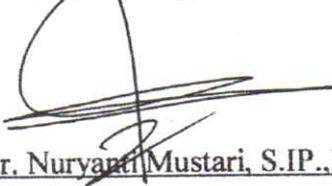
Nama Mahasiswa : Wisdam Nofanda Gunawan

Nomor Stambuk : 105641117616

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

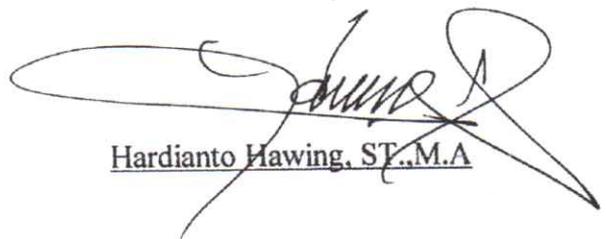
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

Pembimbing II



Hardianto Hawing, ST., M.A

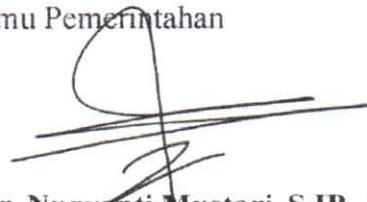
Mengetahui

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan undangan penguji skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, No 0199/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai sala satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Kamis Tanggal 19 Agustus 2021.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos.,M.Si

PENGUJI

1. Dr. Hj. Budi Setiawati., M.Si
2. Ahmad Harakan, S.IP.,M.HI
3. Ahmad Taufik, S.IP.,M.AP
4. Hardianto Hawing, ST.,M.A



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Wisdam Nofanda Gunawan

Nomor Stambuk : 105640209815

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 25 Juli 2021

Yang Menyatakan,

Wisdam Nofanda Gunawan

ABSTRAK

WISDAM NOFANDA GUNAWAN (2021) Tata Kelolah Dinas Pendidikan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dikabupaten Jeneponto (Dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Hardianto Hawing)

Penelitian ini untuk mengetahui Tata Kelolah Dinas Pendidikan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dikabupaten Jeneponto. Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif Tipe penelitian yang di gunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator transparansi adalah Bentuk transparansi dalam dunia pendidikan adalah manajemen keuangan. Prinsip manajemen keuangan sendiri pada dasarnya transparansi harus diterapkan untuk kesejahteraan guru, sehingga dapat memajukan lembaga pendidikan. Partisipasi Dalam hal partisipasi, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam hal mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pemberlakuan belajar di rumah, Dinas Pendidikan membuat suatu inovasi dimana inovasi tersebut diperuntukkan untuk guru dan juga siswa. Bentuk inovasinya adalah adalah guru dapat melakukan pembelajaran menggunakan metode *E-Learning* yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Akuntabilitas, Dalam pelaksanaan daring dimasa pandemi, hal utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana memberikan pembelajaran yang sesuai dengan yang di harapkan, dengan memperhatikan sumber daya pengajarnya, tekhnologi yang digunakan dalam peroses pembelajaran. Dan koordinasi, Koordinasi akan berlangsung secara efektif apabila dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dari tahap awal sampai akhir pekerjaan, mengupayakan hubungan dan pertemuan-pertemuan di antara berbagai pihak yang terkait, serta mengembangkan keterbukaan sehinga jika terdapat perbedaan pandangan dapat didiskusikan dan dipecahkan bersama.

Kata Kunci : Tata kelolah, Covid-19, peningkatan mutu pendidikan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas izin dan petunjuk Allah Swt, sehingga skripsi dengan judul “Tata Kelola Dinas Pendidikan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dikabupaten Jeneponto” dapat terselesaikan. Pernyataan rasa syukur kepada Allah Swt, atas apa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dan tulisan dengankalimat apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan Salam atas junjungan Nabiullah Muhammad Saw, dengan segala petunjuk, kesehatan, dan nasehat agama.

Tidak lupa penulis menghanturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua saya atas segala pengorbanan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam mengajar dan mendidik sejak kecil sampai sekarang ini. Semoga yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan diakhirat.
2. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si, selaku pembimbing I dan Haerdianto Hawing, ST., M.A sebagai pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si, ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibunda Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Ayahanda dan ibunda dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Teman-teman yang selama ini menemani selama proses perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar..

Semoga segala bantuan dan bimbingannya mendapatkan balasan yang setimpal dari sisi Allah Swt sebagai amal ibadah, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak penulis sangat harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 25 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tata Kelola Pemerintahan.....	9
B. Pemerintah Daerah.....	14
C. Mutu Pendidikan.....	15
D. Kerangka Pikir	23
E. Fokus Penelitian.....	23
F. Deskripsi Pokus Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	26
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27

D. Informan Penelitian.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Keabsahan Data	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	35
B. Tata Kelola Dinas Pendidikan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Jeneponto.....	40
C. Pembahasan	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Jumlah Informan	32
---------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep kerangka pikir	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kab. Jenepono	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan masa datang akan sangat ditentukan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri. Generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula. tidak mungkin akselerasi kemajuan bangsa dapat terwujud di masa datang tanpa didukung oleh kemajuan di bidang pendidikan. pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai luhur terutama bagi generasi muda yang akan menentukan maju mundurnya suatu bangsa (Muhardi, 2005)

Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang di harapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mencakup input, proses dan mutu output. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karna dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input pendidikan meliputi: man yakni sumberdaya manusia, money yakni dana, material yakni sarana prasarana, methods yakni visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin di capai serta machines yaitu perangkat lunak sebagai penunjang proses yang meliputi struktur organisasi, peraturan perundang undangan, deskripsi tugas dan sebagainya. Ketersediaan input sangat dibutuhkan agar proses dapat berlangsung dengan baik karena makin tinggi ketersediaan input makin tinggi mutu input tersebut (Rohiat, 2008).

Proses pendidikan adalah mekanisme perubahan input pendidikan menjadi suatu output pendidikan. Proses dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, proses belajar mengajar serta proses monitoring dan evaluasi. Proses pendidikan dikatakan bermutu apabila input dikoordinasikan dan di padukan dengan baik yang mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan dan mendorong motivasi dan minat belajar dan mampu memberdayakan peserta didik. Output pendidikan adalah kinerja sekolah yang merupakan prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan kualitas/mutu output sekolah yakni lulusan yang dapat dilihat dari prestasi akademik dan nonakademik peserta didik. Kualitas output menjadi penting karena merupakan ujung tombak dalam menentukan mutu pendidikan.

Permasalahan yang terjadi saat ini di lingkungan pendidikan adalah menurunnya sistem pembelajaran siswa/siswi bahkan mahasiswa di erah pandemik Covid-19. Covid-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi. Sejak awal tahun 2020 perubahan drastic dibidang pendidikan mulai mengalami revolusi. Pembelajaran yang tadinya didominasi oleh pembelajaran tatap muka harus beralih dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) di semua level pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Guna mencegah penularan corona virus 2019 (Covid-19), kebijakan pendidikan banyak yang dilahirkan. Surat edaran yang diterbitkan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36926/MPK.A/HK/2020 tentang

Pembelajaran daring, para pendidik diharapkan menghadirkan proses pembelajaran menyenangkan bagi siswa (Jerfi Handika, 2020).

Secara empirik realisasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor. Pertama, pemerintah pusat mesti menjamin dengan menyediakan koneksi internet yang lancar dan stabil, subsidi kuota, bantuan perangkat digital, dan peningkatan kapasitas digital juga meminimalisir ketimpangan akses di berbagai wilayah. Harus ada alokasi anggaran secara khusus untuk mendukung lancarnya kegiatan pembelajaran daring tersebut. Pembelajaran daring tidak dapat dilakukan jika sekolah maupun orangtua tidak memiliki kapital memadai untuk mengakses perangkatnya. Pembelajaran ini tidak akan terjadi ketika guru dan siswa sama-sama tidak memiliki komputer, handphone, atau kuota dan jaringan internet yang memadai. Beruntung, belakangan pemerintah membolehkan anggaran Dana BOS untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran daring.

Pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Bagaimana teknologi dapat digunakan, bagaimana penyedia jasa internet pada daerah-daerah terpencil dimana barang elektronik tanpa akses internetpun masi menjadi suatu kemewahan. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak, saat ini kita harus bekerja keras bersama bagaimana membawa teknologi menjawab permasalahan yang terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di daerah-daerah terpencil.

Pendidikan dalam situasi darurat, Unicef-Rdi, saat ini lebih dari 60 juta siswa di Indonesia tidak bisa bersekolah akibat Covid-19. Dari jumlah tersebut,

angka terbanyak berasal dari pelajar SD atau sederajat dengan total lebih dari 28 juta siswa, disusul SMP atau sederajatnya dengan 13 juta siswa, dan SMA atau sederajatnya 11 juta siswa. Berdasarkan data tersebut, masi banyak siswa yang tidak bisa belajar jarak jauh. Hal ini karena beberapa daerah masi terkendala akses listrik, akses internet, dan pembelajaran daring (Offline) masi terbatas (Andri Anugrahana, 2020)

Di Kabupaten Jeneponto sendiri, sekolah mengharuskan siwa/siswinya untuk melakukan sekolah daring atau sekolah online. Keharusan tersebut karena untuk memutuskan penyebaran mata rantai Covid-19, juga karena merupakan imbauan dari pemerintah. Banyak hal yang di lakukan pemerintah termasuk Dinas Pendidikan, guna untuk meningkatkan mutu Pendidikan di masa pandemik ini. Permasalahan yang di hadapai adalah karena kurang efisiennya system pembelajaran yang terjadi antara guru dan siswanya. Banyak murid bahkan orang tua yang merasa terbebani dengan adanya belajar di rumah ini. Kurang efektifnya system belajar mengajar yang menyebabkan banyak siswa yang enggang untuk belajar online, karena merasa apa yang guru mereka ajarkan tidak mampu di cerna dengan baik oleh otak mereka, serta membutuhkan jaringan yang baik karena system belajarnya online.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka teratrik untuk melakukan penelitian dengan judul **Tata Kelola Dinas Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dikabupaten Jeneponto.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini adalah Bagaimana Tata Kelola Dinas Pendidikan Di Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kab. Jenepono ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pembuatan Skripsi penelitian ini adalah Untuk mengetahui Tata Kelola Dinas Pendidikan Di Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kab. Jenepono

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan proposal ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat untuk menghasilkan konsep dalam Tata Kelola Dinas Pendidikan Di Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Jenepono.

2. Manfaat Praktis

- a. Di harapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Jenepono dalam menjalankan Tata kelola Pendidikan di masa pandemik *covid-19*
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat di kombinasikan dengan penelitian-penelitian lainnya, khususnya yang

mengkaji tentang Tata Kelola Dinas Pendidikan Di Masa Pandemi *Covid-19*

Dalam Meningkatkan Mutu Penedidikan Di Kabupaten Jeneponto

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. penelitian Terdahulu

1. Nawafillah Faris (20019), judul penelitian Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Manajemen Berbasis Sekolah Di Mts Negeri Babat Lamogan, hasil penelitiannya yaitu agar strategi peningkatan mutu pendidikan dapat terjalin efektif dan efisien maka perlu adanya pengaturan manajemen yang baik dan adanya monev. Di samping itu perlu adanya kesadaran kepada seluruh elemen sekolah (kepala sekolah, guru, staf, siswa) termasuk orang tua siswa dan masyarakat, bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah melalui peningkatan mutu monitoring dan evaluasi (Monev) menjadi tanggung jawab bersama, sehingga mereka bisa di ikut andilkan dan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap berbagai program yang dilakukan oleh sekolah.
2. Dian Kumalasari (2017), Judul penelitian Upaya Meningkatkan Mutu Sekolah Melalui Manajemen Peningkatan Mutu Tenaga Pendidkan Di SMK AL-HIKMA. Hasil penelitiannya yaitu SMK AL-HIKMA suda mengalami peningkatan mutu pendidikan yang baik serta pelaksanaan manajemen yang jelas dan sistematis. Adapun manajemen pelaksanaan menggunakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang bagus yang mampu menampilkan berbagai informasi kepegawaian yang akurat serta mampu mendukung kerjasama sumber daya manusia (SDM)

3. Mutiaro (2019), dengan judul penelitian Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pasca Sertifikasi Profesi Guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dalam meningkatkan kinerja guru sertifikasi melalui kegiatan dan program KKG/MGMP, seminar, workshop, yang secara langsung di selenggarakan Dinas Pendidikan. Dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan masing-masing kompetensi guru dalam sebuah pertemuan ada yang hanya satu atau dua kompetensi, ada juga yang empat kompetensi sekaligus pembinaan dan pengembangan.

Dari ketiga penelitian tersebut, hampir sama dengan penelitian yang akan saya lakukan. Bedahnya penelitian yang akan saya lakukan yakni lebih berfokus kepada Tata Kelola Dinas Pendidikan Di Masa Covid-19 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Jeneponto.

B. Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola Pemerintahan atau *good governance* secara umum ialah yang menyangkut atau membahastentang pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan jugadapat ditinjau dari segi fungsional pemerintah.

Definisi Tata Kelola Pemerintahan yang baik atau lebih dikenal sebagai sebutan *good governance*, secara umum adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik dengan tujuan untuk

mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. *Governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat di berbagai bidang yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dalam intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Sedarmayanti, 2004).

Sebuah *Governance* dikatakan baik apabila sumber daya dan masalah-masalah publik dapat dikelola dengan cara efektif dan efisien ialah jawaban dari suatu kebutuhan terhadap masyarakat. Dengan adanya fungsi dari beberapa perangkat kelembagaan publik yang sedemikian rupa sehingga dapat memungkinkan bagi kepentingan masyarakat dapat terjamin dengan baik. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Good Governance* ialah penyelenggaraan kekuasaan negara dan administrasi yang melibatkan aktor pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien (Santosa, 2010).

Tata Kelola Pemerintahan merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank, 2008).

Konsep *good governance* adalah aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik yang perlu dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung jawab dan tanggung gugat tidak hanya diberikan kepada

atasan saja melainkan juga kepada masyarakat luas, dalam Tata Kelola Pemerintahan yaitu suatu latihan dari kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosial lainnya (Nugroho, 2008).

Sekretariat tim pengembangan kebijakan nasional tata pemerintahan yang baik. (BAPENAS, 2008) istilah *good governance* yaitu penerapan tata pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintahan yang tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen serta memiliki arti dan makna Tata Kelola Pemerintahan yang baik, yaitu merupakan sebuah konsepsi tentang suatu penyelenggaraan pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik ialah suatu gagasan, tindakan dan memiliki nilai-nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dan dunia usaha swasta serta masyarakat. Melalui hal tersebut, lingkungan instansi pemerintah diharapkan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Beberapa bentuk atau indikator penting dalam tata kelola pemerintahan yang perlu diperhatikan dan menjadi tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik dianggap penting untuk kesejahteraan nasional atau biasa disebut *Good Governance* sesuai dengan kesepakatan dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara. Baik dari tanggung jawab kewenangan ekonomi, administrasi, dan kewenangan politik yang dapat mengatur masalah sosial di negara tersebut. Dari tiga sektor kewenangan dari pemerintah kemudian digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dalam tata kelola pemerintah yang baik akan

menghindari kesalahan dalam alokasi dan dana pembangunan termasuk penanggulangan dini tindak pidana korupsi (Hsiang, 2012).

Tata Kelola Pemerintah atau *Good Governance* adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan sebab di dalamnya terdapat makna etis yang dipandang baik sebagian masyarakat dan sebagiannya belum tentu mendapat penilaian yang sama (Dwipayana, 2003).

Tata Kelola Pemerintahan yaitu salah satu penemuan secara khusus tentang faktor-faktor yang dapat berpengaruh serta berdampak terhadap inisiatif *open government* yang telah diselidiki oleh keempat perspektif yaitu legislasi dan kebijakan, teknologi, organisasi, dan lingkungan.

Disamping itu, Pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan *Good governance* juga memiliki beberapa indikator yang digolongkan menjadi 4 bagian dalam pengukuran Tata Kelola Pemerintahan yang diantaranya indikator tersebut adalah :

1. Transparansi

Transparansi dianggap sebagai cara untuk membuka berbagai hal dari aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk mengawasi setiap aktivitas pemerintah dengan mudah. Konsep transparansi adalah suatu proses keterbukaan dalam menyampaikan suatu informasi atau aktifitas yang dilakukan dengan tujuan agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung dapat ikut bertanggung jawab dalam memberikan pengawasan dan memfasilitasi semua akses informasi yang menjadi faktor utama terciptanya transparansi ini.

2. Partisipasi

Partisipasi merupakan bersifat membangun pada kepentingan dalam merencanakan suatu kebijakan. Membantu memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan atau membandingkan antara berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternative untuk menyelesaikan suatu persoalan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban atas peraturan yang telah dibuat sekaligus menguji kualitas seorang pemimpin atau suatu kebijakan yang tidak berpihak dengan golongan tertentu.

4. Koordinasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang dapat memastikan bahwa seluruh kebijakan yang disepakati, memiliki kepentingan bersama dan juga telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan itu dapat terwujud dengan cara mengintegrasikan visi dan misi pada suatu masing-masing lembaga.

Tata kelola yang baik terdiri dari beberapa komponen utama. Sebagai sistem yang dinamis, unsur-unsur komponen utama itu seperti proses, struktur, nilai pengetahuan, aturan, organisasi, manajemen, kebijakan, sektor swasta, globalisasi, akuntabilitas, dan transparansi. Berinteraksi secara dinamis satu sama lain dan membentuk suatu kesatuan yang unik dengan membangun inklusifitas relasi politik antara negara atau pemerintah, *civil society*, dan sektor bisnis (Farazmand, 2004).

Kualitas pelayanan publik identik dengan perwakilan birokrasi pemerintah, karena itu fungsi langsung pemerintah yaitu memberikan layanan kepada rakyatnya. Namun pemerintah tidak dapat bekerja atau berdiri sendiri, jadi dia harus mulai mengubah paradigma layanan sehingga layanan dapat menjadi lebih baik. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dapat disiarkan untuk menjadi negara kesejahteraan yang berarti melayani kebutuhan orang-orang yang memiliki kepentingan organisasi sesuai dengan peraturan inti dan persetujuan regulasi. Sedangkan kondisi masyarakat saat ini, telah berkembang jauh dinamis, kesejahteraan rakyat yang lebih baik merupakan indikator dari pemberdayaan masyarakat (Fatmawati, 2016).

C. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Republik Indonesia adalah sebuah negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Negara ini lahir dari perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad mendirikan negara kesatuan. Wilayahnya mencakup Sabang sampai Merauke, yang sebelumnya di kuasai oleh Belanda. Melalui perjuangan revolusioner berdirilah negara merdeka yang bernama Republik Indonesia. Sebagai sebuah negara, Republik Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur.

Dalam UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ditegaskan pula Indonesia adalah negara

hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, negara Indonesia adalah negara konsitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan. Untuk menyelenggarakan negara Indonesia, dibentuk lembaga tertinggi negara antarlain lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga pemeriksa keuangan.

Lembaga legis latif terdiri dari atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang gabungan keudanya membentuk MPR. Namun, mengingat wilayah negara Indonesia sangat besar dengan rentang geografi yang luas dan kondisi sosoal budaya yang beragam, UUD 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia dibagi dalam daerah (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota dan desa) yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai ke istimewaan. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konsitusi yang harus di wujudkan. Pemerintah daerah juga memiliki pengertian pemerintahan juga antara lain pengertian pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik, satu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian pemerintah sendri adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas, untuk menggunakan kekuasaan (Hanafi Nurcholis, 2005).

Pemerintah juga bisa diartikan sebagai penguasa satu negara atau badan tertingi yang memerintah suatu Negara Pemerintah merupakan kemudi dalam

bahasa latin asalnya *Gubernaculum*. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja.

Dalam arti luas pengertian pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan Negara. C.F Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

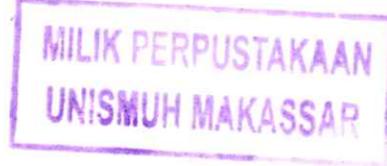
Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara.

Pengertian pemerintahan pusat, penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Pemerintahan daerah sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut undang-undang No. 24 Tahun 2014 adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.



- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan yang disebutkan diatas disimpulkan bahwa fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang dimana menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan seperti yang dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014.

D. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan secara jelas dapat dilihat dari kualitas lulusan. Mutu pendidikan dapat tercapai apabila sistem pendidikan telah dapat melalui proses pendidikan yang bermutu yang mengedepankan mendidik anak agar memiliki etos belajar dan kerja keras, memiliki visi kebangsaan, komitmen kemanusiaan serta etos keilmuan yang kuat sehingga akan dihasilkn lulusan bermutu, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, pembentukan karakter berwawasan kebangsaan dan kemanusiaan tanpa harus mengabaikan kejujuran dan objektivitas (Tirtahardja dan Sulo, 2005)

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan (Joremo S. Arcaro, 2005).

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif (Umaedi, MPMBS, ([http://www.geocities. Com/pengembangan madrasah](http://www.geocities.Com/pengembangan%20madrrasah) diakses 8 April 2008).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat di simpulkan bahwa mutu adalah hasil yang di dapatkan. Dalam ilmu Pendidikan mutu berarti input, output, dan bahan ajar. Serta kemampuan dalam memberikan Pendidikan dan pengajaran.

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam artian hasil (ouput) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu-hasil (output) yang ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung jawab sekolah dalam *School Based Quality*

Improvement bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai. Untuk mengetahui hasil/prestasi yang dicapai oleh sekolah terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik atau "kognitif" dapat dilakukan Benchmarking (menggunakan titik acuan standar, misalnya: NEM oleh PKG atau MGMP). Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap sekolah baik yang sudah ada patokannya (*Benchmarking*) maupun yang lain (kegiatan ekstra-kurikuler) dilakukan oleh individu sekolah sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk memperbaiki target mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya. Dalam hal ini RAPBS harus merupakan penjabaran dari target mutu yang ingin dicapai dan skenario bagaimana mencapainya.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari berbagai sisi. Pertama, kondisi baik tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru laboran, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat software, seperti peraturan, struktur organisasi dan deskripsi kerja. Keempat: mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan cita-cita (Sudarwan Danim, 2006).

Dari beberapa definisi mutu yang telah dikemukakan secara sederhana dapat diambil pemahaman bahwa mutu pendidikan merupakan kemampuan

sistem pendidikan dalam mengelola dan memproses pendidikan secara berkualitas dan efektif untuk meningkatkan nilai tambah agar menghasilkan output yang berkualitas. Output yang dihasilkan oleh pendidikan yang bermutu juga harus mampu memenuhi kebutuhan stakeholders seperti yang diungkapkan oleh E.Mulyasa, 2004 sebagai berikut:

Pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusannya tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan) (E. Mulyasa, 2004).

Jadi mutu pendidikan bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri melainkan terkait dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dimana kebutuhan masyarakat dan perubahan yang terjadi bergerak dinamis seiring dengan perkembangan zaman, sehingga pendidikan juga harus mampu menyeimbangi perubahan yang terjadi secara cepat, dan bisa menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis ketrampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka

itu, mutu luaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh anak didik selama menjalani pendidikan.

Ada enam masalah pokok sistem pendidikan nasional: (1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik, 2) pemerataan kesempatan belajar, (3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, (4) status kelembagaan, (5) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan (6) sumber daya yang belum profesional (E. Mulyasa, 2006).

2. Prinsip Mutu Pendidikan

Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu pendidikan merupakan alat yang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan dalam memperbaiki sistem pendidikan bangsa kita.
- b. Ketidak mampuan para profesional pendidikan dalam menghadapi “kegagalan sistem” yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada.
- c. Peningkatan mutu pendidikan harus melalui loncatan-loncatan. Norma dan kepercayaan lama harus dirubah. Sekolah harus belajar bekerjasama dengan sumber-sumber yang terbatas. Para profesional pendidikan harus

membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global.

- d. Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor Diknas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, teamwork, kerjasama, akuntabilitas, dan rekognisi. Uang tidak menjadi penentu dalam peningkatan mutu.
- e. Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktifitas, dan kualitas layanan pendidikan. Guru akan menggunakan pendekatan yang baru atau model-model mengajar, membimbing, dan melatih dalam membantu perkembangan siswa. Demikian juga staf administrasi, ia akan menggunakan proses baru dalam menyusun biaya, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan program baru.
- f. Para profesional pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global. Ketakutan terhadap perubahan, atau takut melakukan perubahan akan mengakibatkan ketidaktahuan bagaimana mengatasi tuntutan-tuntutan baru.
- g. Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-

penyesuaian dan penyempurnaan. Budaya, lingkungan, dan proses kerja tiap organisasi berbeda. Para profesional pendidikan harus dibekali oleh program yang khusus dirancang untuk menunjang pendidikan.

- h. Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah sistem pengukuran. Dengan menggunakan sistem pengukuran memungkinkan para profesional pendidikan dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupun masyarakat
- i. Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program singkat (Nana Syaodih Sukmadinata Dkk,2006).

Edward Deming, 2005 telah mengembangkan 14 prinsip yang menggambarkan apa yang dibutuhkan sebuah lembaga pendidikan untuk mengembangkan budaya mutu, dengan mengkaitkannya dalam kelangsungan hidup bisnis. Hal ini didasarkan pada kegiatan yang dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Region 3 di Lincoln, *Maine* dan *Soundwell College di Bristol*, Inggris, kedua sekolah ini dapat mencapai sasaran yang sudah digariskan dalam prinsip-prinsip tersebut dan mampu memperbaiki *out come* dan *administrative*. 14 prinsip itu adalah:

- a. Menciptakan konsistensi tujuan, untuk memperbaiki layanan dan siswa, dimaksudkan untuk menjadikan sekolah yang kompetitif dan berkelas dunia.

- b. Mengadopsi filosofi mutu total, setiap orang mesti mengikuti prinsip-prinsip mutu.
- c. Mengurangi kebutuhan pengujian, dan inspeksi yang berbasis produksi massal dilakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendidikan. Memberikan lingkungan belajar yang lebih menghasilkan kinerja siswa yang bermutu.
- d. Menilai bisnis sekolah dengan cara baru, nilailah bisnis sekolah dengan meminimalkan biaya total pendidikan, pandang sekolah sebagai pemasok siswa, bekerja dengan orang tua siswa dan berbagai lembaga untuk memperbaiki mutu Pendidikan
- e. Memperbaiki mutu dan produktifitas serta mengurangi biaya, gambarkan proses memperbaiki, mengidentifikasi mata rantai kostumer, mengidentifikasi bidang-bidang perbaikan, implementasikan perubahan, nilai dan ukur hasilnya serta standarisasikan proses.
- f. Belajar sepanjang hayat, mutu diawali dan diakhiri dengan latihan.
- g. Kepemimpinan dalam pendidikan, merupakan tanggung jawab manajemen untuk memberikan arahan serta mengajarkan dan mempraktikan prinsip-prinsip mutu.
- h. Mengeliminasi rasa takut, hilangkanlah rasa takut dalam bekerja, dengan demikian setiap orang akan bekerja secara efektif untuk perbaikan sekolah.
- i. Mengeliminasi hambatan keberhasilan, manajemen bertanggung jawab untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi orang mencapai keberhasilan dalam menjalankan pekerjaannya.

- j. Menciptakan budaya mutu, ciptakanlah budaya mutu yang menggambarkan tanggung jawab pada orang.
- k. Perbaiki proses.
- l. Membantu siswa berhasil, hilangkanlah rintangan yang merampok hak siswa, guru dan administrator untuk memiliki rasa bangga pada hasil karyanya.
- m. Komitmen, manajemen mesti memiliki budaya mutu.
- n. Tanggung jawab, biarkan setiap orang di sekolah untuk bekerja menyelesaikan transformasi mutu (Joremo S. Arcaro, Op. Cit., h 2005).

E. Kebijakan Pendidikan Dimasa Pandemi Covid-19

Belajar dari rumah ditetapkan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui SE nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan masa darurat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dari kebijakan tersebutlah kemudian berdampak proses pembelajaran yang ada di sekolah, terutama buat peserta didik, guru, maupun orang tua atau keluarga peserta didik. (Purwanto, A., dkk: 2020).

Proses pembelajaran sebagai sesuatu yang dialami siswa di sekolah sendiri merupakan alat kebijakan publik terbaik sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Hal yang kemudian juga telah tertanam dalam diri sebagian besar peserta didik adalah sekolah menjadi tempat yang menyenangkan sebagai wahana bermain, berinteraksi dan membangun

hubungan serta kesadaran sosial. Sekolah pula menjadi pusat interaksi antara guru dengan peserta didik dalam meningkatkan, pengetahuan, keterampilan serta penanaman sikap dan karakter, maka hal tersebutlah yang kemudian tiba-tiba berhenti saat sekolah pun tiba-tiba ditutup.

Kebijakan yang dikeluarkan tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan peserta didik dari bahaya virus tetapi justru pula akan menimbulkan beberapa dampak khususnya pada peserta didik, guru, dan orang tua. Peserta didik sendiri akan merasa terpaksa belajar dari rumah yang sebenarnya tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk hal tersebut, dengan begitu maka proses pembelajaran akan terhambat yang seharusnya sebelum dimulainya pembelajaran tersebut fasilitas pendukung harus tersedia lebih dahulu. Kemudian selanjutnya terletak pada proses adaptasi pembelajaran, peserta didik yang tadinya cenderung berinteraksi langsung dalam pembelajaran akan memerlukan berbagai macam adaptasi belajar serta memahami pembelajaran yang di modelkan dalam jaringan, sehingga kebijakan yang diberikan bisa saja menimbulkan mandeknya pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran. Mengingat bahwa perubahan ke pembelajaran online secara tidak langsung berpengaruh terhadap daya serap peserta didik (Dewi, W.A.F: 2020).

Oleh karenanya, bahwa peserta didik harus didasari oleh berbagai pengalaman belajar agar pembelajaran secara online menjadi lebih fleksibel (Zapalska, A. and Brozik, D. 2006). Pokok permasalahan bagi peserta didik tersebut bermuara pada perubahan lingkungan pembelajaran dari offline ke online sehingga dibutuhkan hal-hal yang harus menarik minat belajar online

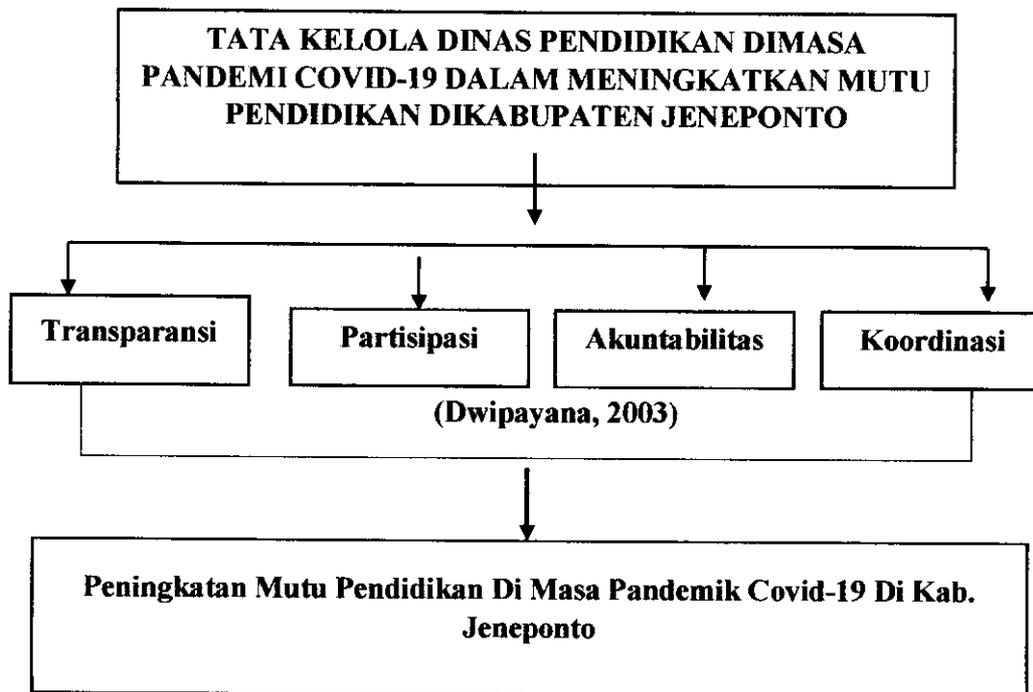
peserta didik melalui penciptaan lingkungan belajar yang positif; membangun komunitas belajar; memberikan umpan balik yang konsisten secara tepat waktu; dan menggunakan teknologi yang tepat untuk mengirimkan konten yang tepat. (Chakraborty:2014)

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam penelitiannya. Melalui kerangka pikir ini, maka tujuan dilakukannya penelitian semakin jelas telah terkonsep terlebih dahulu. Pendidikan yang bermutu bukan hanya dilihat dari kualitas lulusannya tetapi juga mencakup bagaimana lembaga pendidikan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Pelanggan dalam hal ini adalah pelanggan internal (tenaga kependidikan) serta pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat dan pemakai lulusan). Permasalahan terjadi saat ini di lingkungan pendidikan adalah menurunnya sistem pembelajaran siswa/siswi di era pandemik Covid-19.

Melihat permasalahan tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto berupaya untuk bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di era Covid-19 ini. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kabupaten Jeneponto berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, dengan menggunakan teori Tata kelolah pemerintahan dengan indikator Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, dan Koordinasi. (Dwipiyana, 2003).

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



G. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Tata kelola Dinas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Jeneponto. Fokus ini meliputi (1) Transparansi yaitu proses keterbukaan dalam menyampaikan suatu informasi atau aktifitas yang dilakukan. (2) partisipasi, Membantu memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan atau membandingkan antar berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif untuk menyelesaikan suatu persoalan. (3) akuntabilitas yaitu pertanggung jawaban atas aturan yang telah di buat. (4)

koordinasi yaitu mekanisme yang dapat memastikan bahwa seluruh kebijakan yang disepakati.

H. Deskripsi Pokus Penelitian

1. Transparansi

Transparansi yang di maksudkan terkait dengan tata kelola Dimas Pendidikan sebagai cara untuk membuka berbagai hal dari aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk mengawasi setiap aktivitas pemerintah dengan mudah. Konsep transparansi adalah suatu proses keterbukaan dalam menyampaikan suatu informasi atau aktifitas yang dilakukan dengan tujuan agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung dapat ikut bertanggung jawab dalam memberikan pengawasan dan memfasilitasi semua akses informasi yang menjadi faktor utama terciptanya transparansi ini.

2. Partisipasi

Partisipasi bersifat membangun pada kepentingan dalam merencanakan suatu kebijakan. Membantu memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan atau membandingkan antara berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternative untuk menyelesaikan suatu persoalan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban atas peraturan yang telah dibuat sekaligus menguji kualitas seorang pemimpin atau suatu kebijakan yang tidak berpihak dengan golongan tertentu. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dari lembaga-lembaga "*Stakeholder*" akuntabilitas ini

tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

4. Koordinasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang dapat memastikan bahwa seluruh kebijakan yang disepakati, memiliki kepentingan bersama dan jugatelah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan itu dapat terwujud dengan cara mengintegrasikan visi dan misi pada suatu masing-masing lembaga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama dua bulan. Penelitian ini menetapkan tempat penelitian pada kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena data ataupun dokumen-dokumen sesuai dengan Tata Kelolah Dinas Pendidikan di masa pandemik Covid-19 dalam meningkatkan mutu Pendidikan dikabupaten Jeneponto.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data dan dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Kemudian data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen.

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang Tata Kelolah Dinas Pendidikan di masa pandemik Covid-19 dalam meningkatkan mutu Pendidikan dikabupaten Jeneponto.. Penelitian ini akan lebih menekankan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam rangka mengetahui analisis dari kebijakan tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari data yang diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka catatan data yang diperoleh menjadi sumber data.

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertamanya. Dengan kata lain, data primer adalah data yang akurat yang diperoleh secara langsung melalui hasil interview kepada responden yang dijadikan sebagai subyek penelitian
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti sebagai penunjang dari data pertama. Dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku, dokumen, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yakni Tata Kelola Dinas Pendidikan di masa pandemik Covid-19 dalam meningkatkan mutu Pendidikan dikabupaten Jeneponto.

D. Informan Penelitian

Teknik pengumpulan informan menggunakan teknik *Purposive* yang sejak awal informan telah ditentukan karena sesuai dengan topik penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN/INSTNASI	KETERANGAN
1	Muhammad Ahamd	MA	Kepala Dinas	1
2	Junaidi Kusminto	JK	Pegawai	1
3	Irfan Muhmid	IM	Guru	1
4	Astrino Takdir	AT	Guru	1

Tabel 3.1
Jumlah Informan

Hasil Kajian Peneliti

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan kegiatan tanya jawab oleh penulis kepada informan penelitian yang berhubungan dengan Tata Kelolah Dinas Pendidikan di masa pandemik Covid-19 dalam meningkatkan mutu Pendidikan dikabupaten Jeneponto.

2. Observasi

Secara langsung mengamati sehingga terjadi interaksi dengan subjek penelitian kemudian peneliti mencatat apa saja yang didadap dilokasi penelitian untuk memberikan gambaran secara utuh objek yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

G. Keabsahan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas yang diperoleh. Pengembangan validitas yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber
2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda

3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber yang lain. Menggali suatu sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang berbeda (tempat)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.

1. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur Penunjang urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi

- a) perumusan kebijakan teknis di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b) penyusunan rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- c) penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- d) pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan dinas
- e) penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jenepono.

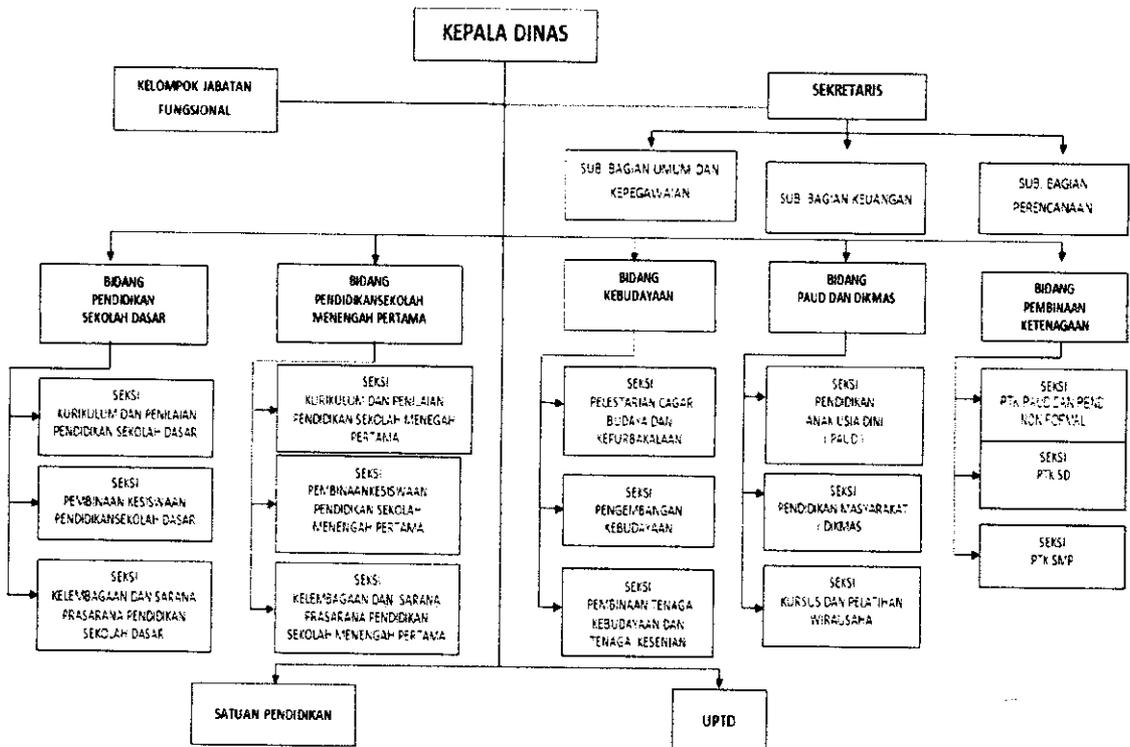
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jenepono terdiri dari :

1. Kepala dinas
2. Sekretaris, terdiri atas:
 - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) kepala sub bagian keuangan;
 - 3) kepala sub bagian perencanaan.
3. Bidang pendidikan sekolah dasar terdiri atas:
 - 1) seksi kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah dasar;
 - 2) seksi pembinaan kesiswaan pendidikan sekolah dasar.
 - 3) seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah dasar;
4. Bidang pendidikan sekolah menengah pertama terdiri atas:
 - 1) Seksi kurikulum dan penilaian pendidikan sekolah menengah pertama;
 - 2) Seksi pembinaan kesiswaan pendidikan sekolah menengah pertama.
 - 3) seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama;

5. Bidang kebudayaan :
 - 1) seksi pelestarian cagar budaya dan keurbakalaan;
 - 2) seksi pengembangan kebudayaan;
 - 3) seksi pembinaan tenaga kebudayaan dan tenaga kesenian.
6. Bidang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat(Dikmas) terdiri atas :
 - 1) seksi pendidikan anak usia dini (paud);
 - 2) seksi pendidikan masyarakat (dikmas);
 - 3) seksi kursus dan pelatihan wirausaha.
7. Bidang pembinaan ketenagaan terdiri atas :
 - 1) seksi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) paud dan pendidikan non formal;
 - 2) seksi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) sekolah dasar;
 - 3) seksi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) sekolah menengah pertama.
8. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Kecamatan (11 UPTD);
9. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) satuan pendidikan sejenis;
10. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto



Sumber : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati Jeneponto dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas penyelenggaraan kewenangan Daerah dalam Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Bidang PAUD dan Dikmas, Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Bidang Kebudayaan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan Administrasi yang berkaitan dengan Administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Administrasi keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan , Perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga.
- b. Penyelenggaraan kebijakan Administrasi Kepegawaian , Administrasi Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pembinaan , pengkoordinasian , pengendalian , Pengawasan Program dan Kegiatan Sub Bagian;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan Evaluasi Program kegiatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Bidang pendidikan sekolah menengah pertama mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pembinaan untuk pengembangan kegiatan dalam bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama , Menyusun rencana, memberi tugas, petunjuk, menilai pelaksanaan tugas bawahan pada bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, termasuk pembinaan dan pengembangan kurikulum, pembinaan kesiswaan serta kelembagaan dan sarana prasarana

Pendidikan.

4. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pembinaan untuk pengembangan Kebudayaan, Pelestarian Cagar Budaya dan Kepurbakalaan, dan pembinaan tenaga Kesenian, Menyusun rencana, serta mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada bidang pembinaan Kebudayaan.

5. Bidang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat(DIKMAS)

Bidang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) mempunyai tugas Menyusun, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang pembinaan ketenagaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan pembinaan untuk pengembangan tenaga guru dan tenaga Kependidikan serta pelatihan peningkatan kompetensi guru, Menyusun rencana, memberi tugas, petunjuk, menilai pelaksanaan tugas bawahan pada bidang guru dan tenaga Kependidikan.

B. Tata Kelola Dinas Pendidikan Di Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kab. Jeneponto

Permasalahan yang terjadi saat ini di lingkungan pendidikan adalah menurunnya sistem pembelajaran siswa/siswi bahkan mahasiswa di era pandemik Covid-19. Covid-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi. Sejak awal tahun 2020 perubahan drastic dibidang pendidikan mulai mengalami revolusi. Pembelajaran yang tadinya didominasi oleh pembelajaran tatap muka harus beralih dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) di semua level pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Guna mencegah penularan corona virus 2019 (Covid-19), kebijakan pendidikan banyak yang dilahirkan. Surat edaran yang diterbitkan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36926/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran daring, para pendidik diharapkan menghadirkan proses pembelajaran menyenangkan bagi siswa.

Di Kabupaten Jeneponto, sekolah mengharuskan siswa/siswinya untuk melakukan sekolah daring atau sekolah online. Keharusan tersebut karena untuk memutuskan penyebaran mata rantai Covid-19, juga karena merupakan imbauan dari pemerintah. Banyak hal yang dilakukan pemerintah termasuk Dinas Pendidikan, guna untuk meningkatkan mutu Pendidikan di masa pandemik ini. Permasalahan yang dihadapi adalah karena kurang efisiennya sistem pembelajaran yang terjadi antara guru dan siswanya. Banyak murid bahkan orang tua yang merasa terbebani dengan adanya belajar di rumah ini. Kurang efektifnya sistem belajar mengajar yang menyebabkan banyak siswa

yang enggang untuk belajar online, karena merasa apa yang guru mereka ajarkan tidak mampu di cerna dengan baik oleh otak mereka, serta membutuhkan jaringan yang baik karena system belajarnya online.

Untuk meninjau dan mengetahui lebih lanjut Tata Kelola Dinas Pendidikan Di Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kab. Jenepono, beberapa tahapan diantaranya adalah (1) Transparansi (2) Partisipasi (3) Akuntabilitas (4) Kordinasi. Hasil pengkajian keempat tahap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Transparansi

Konsep transparansi adalah suatu proses keterbukaan dalam menyampaikan suatu informasi atau aktifitas yang dilakukan dengan tujuan agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung dapat ikut bertanggung jawab dalam memberikan pengawasan dan memfasilitasi semua akses informasi yang menjadi faktor utama terciptanya transparansi ini.

Transparansi yang di maksudkan terkait dengan tata kelola Dinas Pendidikan sebagai cara untuk membuka berbagai hal dari aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk mengawasi setiap aktivitas pemerintah dengan mudah. Konsep transparansi adalah suatu proses keterbukaan dalam menyampaikan suatu informasi atau aktifitas yang dilakukan dengan tujuan agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung dapat ikut bertanggung jawab dalam memberikan pengawasan dan memfasilitasi semua akses informasi yang menjadi faktor utama terciptanya transparansi ini.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala dinas pendidikan terkait dengan Transparansi, sebagai berikut :

“Permasalahan yang dihadapi oleh Negara Indonesia tidak terkecuali sector pendidikan adalah permasalahan Virus Covid-19. Sejak adanya virus covid-19, segala kegiatan mulai dibatasi, termasuk kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan di sekolah. Saat ini, semua sekolah di tutup dan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Kegiatan belajar secara daring merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri pendidikan, dan diterapkan di semua sekolah yang ada di Indonesia. Proses belajar dari dianggap sebagai suatu hal yang dapat digunakan untuk memutuskan mata rantai penyebaran corona virus. Meskipun sekolah tutup dan siswa belajar menggunakan online, tetapi system pendidikan dan kebijakan pendidikan yang berlaku masih terus berjalan yang membedakan saat ini banyak kebijakan yang ditetapkan guna untuk tetap meningkatkan mutu pendidikan dimasa pandemik”. (Wawancara dengan MA, Tgl 01 Juli 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu pegawai Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto terkait dengan transparansi pendidikan di masa pandemik Covid-19

“Permasalahan yang dihadapi Dunia saat ini adalah kita sedang berjuang melawan Virus Corona. Corona virus yang saat ini menjadi suatu wabah yang masih menjadi benaluah bagi kita semua. Sejak adanya virus corona, semua kegiatan menjadi terbatas. Hal tersebut juga di hadapi oleh pendidikan saat ini. Semenjak adanya virus corona, semua sekolah terpaksa harus di tutup dan system belajar mengajar di alihkan ke system daring. Anak-anak tidak lagi melakukan pembelajaran di sekolah tetapi di rumah, guru tidak lagi mengajar secara langsung tetapi harus melalui Zoom, yang dianggap suatu masalah bagi sekelompok orang. Pembelajaran melalui zoom saat ini menjadi suatu metode pendidikan baru yang harus di lakukan oleh semua kalangan. Tetapi, meskipun system pendidikan saat ini dianggap kurang efisien karena harus melalui system daring, tetapi kami selalu berupaya untuk bagaimana memberikan kebijakan, pelayanan, yang baik kepada guru-guru dan murid-murid agar pada saat pembelajaran melalui daring dapat di lakukan dengan baik”(JK, Tgl 01 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sejak keberadaan Virus corona, banyak hal yang menjadi terganggu, termasuk system pendidikan. Sejak adanya virus corona, system pendidikan diharuskan dialihkan ke system pendidikan onlain, dimana guru tidak lagi mengajar siswa-siswinya di sekolah tetapi di rumah, dan siswa-siwi tidak lagi belajar atau bersekolah seperti biasanya di sekolah tetapi di rumah.

Didalam sistem pemerintahan, konsep transparansi digunakan sebagai subjek analisis pada bidang teori negosiasi, keamanan internasional, dan efektivitas suatu rezim. Dalam hal ini, transparansi menjadi sisi afektif bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan publik, utamanya dalam mengidentifikasi seberapa efektif suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap aplikasinya ke dalam masyarakat. Transparansi dalam kebijakan publik didefinisikan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan informasi sosial, politik, ekonomi, segala bidang yang melibatkan masyarakat dalam memberikan ketersediaan, kepercayaan, dan aksesibilitas informasi antar pemangku kepentingan.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan bersama dengan kepala dinas pendidikan dan olahraga terkait dengan transparansi dalam pendidikan sebagai berikut

“Urgensi konsep transparansi dalam dunia pendidikan pemerintah pusat dan daerah saling berintegrasi memberikan arahan dalam memfasilitasi kebutuhan dalam proses pemenuhan kebutuhan disektor pendidikan. Bentuk transparansi yang harus di perhatikan dalam dunia pendidikan saat ini dimasa pandemic seperti saat ini adalah bantuan dana BOS yang dikirimkan ke rekening-rekening sekolah yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan para siswa-siswi untuk mendapatkan pembelajaran. Saat ini system

pendidikan melalui daring, maka bantuan tersebut di pergunakan untuk mengaji para guru honorer, serta untuk pembelian kuota para siswa-siswi serta guru-guru. Tetapi saat ini kuota telah di kirimkan melalui program mendikbud maka bantuan dana BOS menjadi tanggung jawab setiap sekolah dan akan di pertanggung jawabkan oleh masing-masing sekolah, karena setiap sekolah memiliki laporan pertanggung jawabannya tersendiri” (Wawancara dengan MA, Tgl 01 Juli 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh sala satu pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, terkait dengan transparansi dalam pendidikan

“Jika berbica tentang tranparansi, maka kita membahas tentang keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakatnya, antara sekolah dan dinas pendidikan karena sekolah berada di bawah naungan dinas pendidikan. Maka semua yang berkaitan dengan system pendidikan di kabupaten berikatan dengan dinas pendidikan, termasuk manajemen kuangannya. hal terpenting dalam sekolah ialah manajemen keuangan. Sebagian orang yang menganggap bahwa berbicara mengenai uang adalah pembicaraan yang sensitif, sehingga apapun yang berhubungan dengan uang haruslah jelas. Manajemen keuangan bermanfaat untuk mengetahui berapa banyak uang yang masuk dan dikeluarkan, serta lebih terorganisir. Berkaitan dengan sekolah maka pemanfaatan uang dengan baik dapat memengaruhi lembaga sekolah itu sendiri. Apabila manajemen keuangan disalahgunakan atau dianggap enteng, dengan pencatatatn yang kurang teratur, maka hal ini akan memengaruhi kondisi lembaga pendidikan. Maka dari itu, tranparansi dalam dunia pendidikan itu sangat penting, apalagi dimasa pandemic covid-19 saat ini, dimana semuanya dikerjakan melalui ssitem onain dan bias saja akan terjadi penyalah gunaan tetapi kami selalu menghimbau dan memberikan peringatan kepada setiap sekolah-sekolah agar pelaporan pertanggung jawaban dana yang dipergunakan di hitung, dibuat dengan sebaik-baiknya karena jika ada kesalahan dalam perhitungan atau ada dana yang tidak sesuai dengan anggaran maka akan berdampak fatal” (Wawancara dengan JK, Tgl 01 Juli 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat di diketahui bahwa transparasi sangat penting dalam dunia pendidikan. Transpaaransi penting dalam dunia pendidikan karena manajemen keuangan yang ada di pendidikan tidakla

sedikit. Prinsip manajemen keuangan sendiri pada dasarnya transparansi harus diterapkan untuk kesejahteraan guru, sehingga dapat memajukan lembaga pendidikan. Penerapan dua prinsip ini akan membawa pada nilai positif bagi semua pihak sekolah khususnya guru. Apalagi saat ini, dimasa pandemic covid-19, dimana semua dilakukan secara online, guru mengajar melalui daring, siswa belajar di rumah, maka manajemen keuangan sisten pendidikan juga harus di perhatikan Karen jika tidak bisa saja akan dengan mudah terjadi penyelewangan. Makanya semua sekolah di himbau untuk selalu memberikan pelaporan terkait dengan sisntem pembelajarannya, manajemen keuangannya, serta hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan.

2. Partisipasi

Partisipasi bersifat membangun pada kepentingan dalam merencanakan suatu kebijakan. Membantu memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan atau membandingkan antara berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternative untuk menyelesaikan suatu persoalan.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan bersama dengan kepala dinas pendidikan terkait dengan partisipasi, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Peralihan proses pembelajaran secara langsung menjadi pembelajaran yang dilakukan secara daring (dalam jaringan) menjadi pilihan oleh berbagai pihak pendidikan, ada era pandemi Covid-19 saat ini, guru dituntut memanfaatkan media teknologi berbasis online untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Guru juga dituntut memanfaatkan tekonologi untuk pembelajaran yang mampu memotivasi siswa. Perubahan yang terjadi ini memaksa guru untuk mengubah proses pembelajaran interaktif menjadi non interaktif. Hal ini menjadi problematika baru bagi guru dalam menyajikan materi pembelajaran supaya siswa

mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi siswa dapat tercapai dengan baik, apabila siswa dapat memberikan partisipasinya dalam proses pembelajaran secara aktif. Berbagai faktor dapat dipandang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pembelajaran. Salah satu faktor yang penting adalah media pembelajaran yang diterapkan oleh guru” (Wawancara dengan MA, Tgl 01 Juli 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu guru, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Dierah pandemic covid-19, dimana sekolah di tutup dan system belajar mengajar di alihkan ke system daring. Kami para guru di tuntutan untuk berpartisipasi lebih, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan system pendidikan yang terjadi saat ini harus kita ikuti. Jika duluh sebelum adanya corona kita mengajar di sekolah sekarang harus melalui system daring. Kesulitan yang di hadapi dimana banyak siswa yang kadang tidak focus mendengarkan karena efek malas dan bosang, kadang siswa tidak memiliki Handphone, hal-hal seperti itu yang harus kami antisipasi dan harus kami selesaikan agar bagaimana semua siswa dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. Jika di Tanya tentang bagaimana tingkat partisipasi kami maka jika di dibandingkan dengan masa sebelum pandemik dan masa pandemik seperti saat ini, kami harus berpartisipasi lebih karena tuntutan, dan juga karena memang merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang guru” (Wawancara dengan IM, Tgl 05 Juli 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pendidikan dalam masa pandemik Covid-19 ini membawa berbagai elemen berkerja lebih dari sebelumnya. Di masa pandemik covid-19 yang mengharuskan guru dan siswa melakukan pembelajaran yang berbeda, dimana kesulitan yang di hadapi guru ataupun siswa belum sepenuhnya terbiasa melakukan aktivitas belajar dengan teknologi digital atau secara daring. Guru masih fokus pada buku pembelajaran yang menyebabkan proses pembelajaran masih menggunakan metode ceramah sehingga proses pembelajaran bersifat

konvensional. Hal tersebut karena dimana guru dituntut memanfaatkan media teknologi berbasis online untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Guru juga dituntut memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang mampu memotivasi siswa, sehingga guru dan siswa dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam peraturan pemerintah yang dibuat guna mencegah penularan Virus Covid-19.

Konsep sekolah di rumah (*home-schooling*) tidak pernah menjadi arus utama dalam wacana pendidikan nasional. Meski makin populer, penerapan pembelajaran online (*online learning*) selama ini juga terbatas pada Universitas Terbuka, program kuliah bagi karyawan di sejumlah universitas dan kursus-kursus tambahan (*online courses*). api, kebijakan physical distancing untuk memutus penyebaran wabah, memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah menjadi belajar dari rumah, dengan sistem online, dalam skala nasional.

Sistem pendidikan online pun tidak mudah. Di samping disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, ada fasilitas dan sumber daya yang mesti disediakan. Dengan kata lain, sistem pembelajaran online ini berpotensi membuat kesenjangan sosial ekonomi yang selama ini terjadi, menjadi makin melebar saat pandemi.

Melihat permasalahan tersebut, pemerintah dan semua kalangan di tuntut untuk lebih berpartisipasi lebih dalam menangani permasalahan tersebut. Keberadaan Corona Virus, dan tuntutan belajar secara daring membuat

permasalahan yang akan berdampak besar terhadap tatanan kehidupan tidak lebih system pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Sala satu masyarakat, terkait dengan partisipasi dalam pendidikan dimasa pandemi Covid-19, sebagai berikut :

“Wabah virus corona sampai saat ini masi menjadi suatu permasalahan yang belum ada solusinya. Telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah, untuk megantisipasi penyebaran virus corona ini salah satunya adalah dengan memberlakukannya belajar di rumah. Untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam dunia pendidikan, pemerintah melakukan terobosan guna untuk menciptakan kondisi yang eksklusif. Bentuk partisipasi pemerintah dalam menangani maslah pendidikan dimasa pandemi adalah dengan memberikan inovasi. Inovasi yang diberikan pemerintah adalah guru dapat melakukan pembelajaran menggunakan metode *E-Learning* yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer (PC) atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet, guru dapat melakukan pembelajaran bersama diwaktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti *Whatsapp (WA)*, *telegram*, *aplikasi Zoom* ataupun media sosial lainnya sebagai sarana pembelajaran sehingga dapat memastikan siswa belajar diwaktu bersamaan meskipun ditempat yang berbeda. Guru juga dapat memberikan tugas terukur namun tetap memastikan bahwa tiap hari pembelajaran peserta didik terlaksana tahap demi tahap dari tugas tersebut. Banyak lagi inovasi lainnya yang bisa dilakukan oleh pendidik demi memastikan pembelajaran tetap berjalan dan siswa mendapatkan ilmu sesuai kurikulum yang telah disusun pemerintah. Sealing itu, Kepala Sekolah juga harus berinovasi dalam menjalankan fungsi supervisi atau pembinaan kepada Guru untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar telah dilakukan oleh guru dan peserta didik meskipun menggunakan metode jarak jauh (daring). Kepala Sekolah juga dapat memberikan solusi dan motivasi kepada guru di sekolah, sehingga guru-guru yang belum siap memanfaatkan media daring dapat disupervisi dan diberi solusi. Untuk pengawas sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kota dan Kabupaten juga dapat berinovasi agar tetap menjalankan pengawasan dan tujuan dari supervisinya dapat berjalan dengan

baik meskipun tidak harus selalu bertatap muka” (Wawancara dengan AT, 06 Juli 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh sala satu pegawai Dinas Pendidikan terkait dengan partisipasi, dalam wawancaranya sebagai berikut

“Dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring, dinas pendidikan melakukan banyak hal untuk memastikan peroses pembelajaran tersebut berjalan dengan baik. Peroses tersebut dinilai sebagai salah satu bentuk partisipasi dinas pendidikan untuk tetap memperhatikan system pendidikan yang ada di Kabupaten Joneponto berjalan dengan baik. Hal yang dilakukan dinas pendidikan adalah dengan Membentuk Pos Pendidikan Dinas Pendidikan dalam masa darurat COVID-19 dapat membentuk Pos Pendidikan. Pos Pendidikan ini bertugas sebagai sekretariat penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan. Keanggotaan Pos Pendidikan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan media. Pos pendidikan ini merupakan bagian dari Gugus Tugas COVID-19 di daerah, Melakukan koordinasi secara daring dengan Kemendikbud melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP/BP-PAUD Dikmas) terkait pelaksanaan kebijakan BDR, Melakukan pendataan di daerah, Pemerintah daerah wajib melakukan pendataan pelaksanaan BDR sesuai dengan format yang disediakan Kemendikbud melalui tautan <http://data.spab.kemdikbud.go.id>, Menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 di daerah, Melakukan penyebaran informasi dan edukasi pencegahan COVID-19 melalui grup media daring, radio, pengumuman keliling, serta menginformasikan perkembangan penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan kepada masyarakat, Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BDR oleh satuan pendidikan, serta Melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan BDR kepada Kemendikbud dan menginformasikan perkembangan BDR kepada masyarakat secara rutin” (Wawancara dengan JK, Tgl 01 Juli 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat di diketahui bahawa dalam hal partisipasi, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam hal mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pemberlakuan belajar di

rumah, Dinas Pendidikan membuat suatu inovasi dimana inovasi tersebut diperuntukkan untuk guru dan juga siswa. Bentuk inovasinya adalah guru dapat melakukan pembelajaran menggunakan metode *E-Learning* yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer (PC) atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet, guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti *Whatsapp (WA)*, *telegram*, *aplikasi Zoom* ataupun media sosial lainnya sebagai sarana pembelajaran sehingga dapat memastikan siswa belajar di waktu bersamaan meskipun ditempat yang berbeda. Guru juga dapat memberikan tugas terukur namun tetap memastikan bahwa tiap hari pembelajaran peserta didik terlaksana tahap demi tahap dari tugas tersebut.

Selain itu, Dinas pendidikan juga tetap dapat memantau system pendidikan yang ada dengan cara Membentuk Pos Pendidikan Dinas Pendidikan dalam masa darurat COVID-19 dapat membentuk Pos Pendidikan. Pos Pendidikan ini bertugas sebagai sekretariat penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan. Keanggotaan Pos Pendidikan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan media. Pos pendidikan ini merupakan bagian dari Gugus Tugas COVID-19 di daerah, Melakukan koordinasi secara daring dengan Kemendikbud melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP/BP-PAUD

Dikmas) terkait pelaksanaan kebijakan BDR, Melakukan pendataan di daerah, Pemerintah daerah wajib melakukan pendataan pelaksanaan BDR sesuai dengan format yang disediakan Kemendikbud melalui tautan <http://data.spab.kemdikbud.go.id>, Menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 di daerah, Melakukan penyebaran informasi dan edukasi pencegahan COVID-19 melalui grup media daring, radio, pengumuman keliling, serta menginformasikan perkembangan penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan kepada masyarakat, Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BDR oleh satuan pendidikan, serta Melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan BDR kepada Kemendikbud dan menginformasikan perkembangan BDR kepada masyarakat secara rutin. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran secara online.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban atas peraturan yang telah dibuat sekaligus menguji kualitas seorang pemimpin atau suatu kebijakan yang tidak berpihak dengan golongan tertentu. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dari lembaga-lembaga "*Stakeholder*" akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat,

apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan akuntabilitas, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Untuk memastikan pembelajaran daring berjalan dengan baik, sekolah atau tenaga pendidik harus memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, serta infrastruktur yang memadai. Pembelajaran daring kerap memunculkan tantangan baru karena pada kenyataannya guru maupun tenaga kependidikan, tidak atau belum siap untuk menjaga kelangsungan pembelajaran daring. Tidak semua guru dan tenaga kependidikan bisa beradaptasi dengan baik menghadapi perubahan teknologi, dan siap menggunakan teknologi maju. Karena itu, setiap sekolah perlu memberikan dukungan teknis berupa staf terlatih yang akan memberikan pendampingan, pelatihan, dan pelayanan hotline. Mereka inilah yang berada di garda depan yang siap membantu jika guru dan tenaga kependidikan membutuhkan bantuan teknis dalam mengatasi kendala yang terjadi” (Wawancara dengan MA, Tgl 01 Juli 2021).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu Guru terkait dengan akuntabilitas, hasil wawancaranya mengatakan sebagai berikut :

“Peroses belajar secara daring merupakan salah satu hal yang baru dalam dunia pendidikan. Peroses belajar secara daring memberikan pengalaman tersendiri, kesulitan, dan kemudahan tersendiri. Dalam memastikan pembelajaran daring berjalan dengan baik, kami di fasilitasi dengan perlengkapan yang memadai, diberikan pendampingan dan pelatihan, karena tidak semua dari kami paham dan mengerti tentang media social” (Wawancara dengan AT, Tgl 06 Juli 2021)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa terkait dengan akuntabilitas, dalam pelaksanaan daring dimasa pandemi, hal utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana memberikan pembelajaran

yang sesuai dengan yang di harapkan, dengan memperhatikan sumber daya pengajarnya, teknologi yang digunakan dalam peroses pembelajaran.

Di samping Guru dan tenaga pendidikan, sekolah juga harus menyediakan platform pembelajaran daring yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemendikbud telah memberi beberapa pilihan platform pembelajaran daring yang bisa digunakan secara gratis. Selain itu, *platform open source* yang menyediakan fitur lebih lengkap seperti Moodle bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Pengelola pendidikan tentunya dapat memilih pola pembelajaran daring maana yang sesuai dengan kondisi masing-masing dengan tetap memperhatikan kualitas kegiatan belajar mengajar.

Banyaknya media komunikasi yang bisa digunakan belum tentu menjawab kebutuhan masing-masing perguruan tinggi dalam menegakkan akuntabilitas penyelenggaraan pembelajaran daring.

4. Koordinasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang dapat memastikan bahwa seluruh kebijakan yang disepakati, memiliki kepentingan bersama dan jugatelah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan itu dapat terwujud dengan cara mengintegrasikan visi dan misi pada suatu masing-masing lembaga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan sala satu pegawai Dinas Pendidikan Kab. Jeneponto terkait dengan koordinasi sebagai berikut :

“Kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan terlihat pada besaran alokasi dana pendidikan dalam APBN, terus mengalami peningkatan. Hal menjadi indikasi adanya keseriusan pemerintah dalam memberikan jaminan tiap warga negara mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas. Ditengah pandemi covid-19, pemerintah masi saja memperhatikan bagaimana pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik meskipun ditengan wabah corona. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah mengambil jalan dengan melakukan pembelajaran secara daring, tentu saja hal tersebut telah di pertimbangkan secara matang-matang dan telah di koordinasikan dengan berbagai elemen. Dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan pemerintah tidak sendiri, tetapi mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari yang lainnya” (Wawancara dengan MA, Tgl 01 Juli 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh sala satu guru, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Sekolah merupakan lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran Sekolah atau sering juga disebut suatu pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. “Untuk mencapai tujuan sekolah, diperlukan sistem pengelolaan sekolah yang baik”. Koordinasi dalam manajemen dan kepemimpinan sekolah adalah untuk menumbuhkan sikap egaliter, serta meningkatkan rasa kesatatuan dan persatuan di antara kepala sekolah maupun guru-guru dengan tetap menghargai kewajiban dan wewenang masing-masing. Tetapi, saat ini system pendidikan beralih ke system daring, maka koordinasi antara guru dan kepala sekolah, guru dan pemerintah masi harus tetap berjalan dengan baik, meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Koordinasi akan berlangsung secara efektif apabila dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dari tahap awal sampai akhir pekerjaan, mengupayakan hubungan dan pertemuan-pertemuan di antara berbagai pihak yang terkait, serta mengembangkan keterbukaan sehinga jika terdapat perbedaan pandangan dapat didiskusikan dan dipecahkan bersama” (Wawancara dengan IM, Tgl 05 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di jelaskan bahwa Kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan terlihat pada besaran alokasi

dana pendidikan dalam APBN, terus mengalami peningkatan. Hal menjadi indikasi adanya keseriusan pemerintah dalam memberikan jaminan tiap warga negara mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas. Untuk menumbuhkan mutu pendidikan yang baik maka perlu dilakukan koordinasi. Koordinasi dalam manajemen dan kepemimpinan sekolah adalah untuk menumbuhkan sikap egaliter, serta meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan di antara kepala sekolah maupun guru-guru dengan tetap menghargai kewajiban dan wewenang masing-masing.

Tetapi, saat ini system pendidikan beralih ke system daring, maka koordinasi antara guru dan kepala sekolah, guru dan pemerintah masi harus tetap berjalan dengan baik, meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Koordinasi akan berlangsung secara efektif apabila dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dari tahap awal sampai akhir pekerjaan, mengupayakan hubungan dan pertemuan-pertemuan di antara berbagai pihak yang terkait, serta mengembangkan keterbukaan sehingga jika terdapat perbedaan pandangan dapat didiskusikan dan dipecahkan bersama.

C. Pembahasan

1. Transparansi

Transparansi yang di maksudkan terkait dengan tata kelola Dimas Pendidikan sebagai cara untuk membuka berbagai hal dari aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk mengawasi setiap aktivitas pemerintah dengan mudah. Konsep transparansi adalah suatu proses keterbukaan dalam

menyampaikan suatu informasi atau aktifitas yang dilakukan dengan tujuan agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung dapat ikut bertanggung jawab dalam memberikan pengawasan dan memfasilitasi semua akses informasi yang menjadi faktor utama terciptanya transparansi ini.

Bentuk transparansi dalam dunia pendidikan adalah manajemen keuangan. Prinsip manajemen keuangan sendiri pada dasarnya transparansi harus diterapkan untuk kesejahteraan guru, sehingga dapat memajukan lembaga pendidikan. Penerapan dua prinsip ini akan membawa pada nilai positif bagi semua pihak sekolah khususnya guru. Apalagi saat ini, dimasa pandemic covid-19, dimana semua dilakukan secara online, guru mengajar melalui daring, siswa belajar di rumah, maka manajemen keuangan sisten pendidikan juga harus di perhatikan Karen jika tidak bisa saja akan dengan mudah terjadi penyelewangan. Makanya semua sekolah di himbau untuk selalu memberikan pelaporan terkait dengan sistem pembelajarannya, manajemen keuangannya, serta hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan.

2. **Partisipasi**

Partisipasi bersifat membangun pada kepentingan dalam merencanakan suatu kebijakan. Membantu memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan atau membandingkan antara berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternative untuk menyelesaikan suatu persoalan.

Dalam hal partisipasi, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam hal mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pemberlakuan belajar di rumah, Dinas Pendidikan membuat suatu inovasi

dimana inovasi tersebut diperuntuhkan untuk guru dan juga siswa. Bentuk inovasinya adalah adalah guru dapat melakukan pembelajaran menggunakan metode *E-Learning* yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer (PC) atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet, guru dapat melakukan pembelajaran bersama diwaktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti *Whatsapp (WA)*, *telegram*, *aplikasi Zoom* ataupun media sosial lainnya sebagai sarana pembelajaran sehingga dapat memastikan siswa belajar diwaktu bersamaan meskipun ditempat yang berbeda. Guru juga dapat memberikan tugas terukur namun tetap memastikan bahwa tiap hari pembelajaran peserta didik terlaksana tahap demi tahap dari tugas tersebut.

Selaing itu, Dinas pendidikan juga tetap dapat memataui system pendidikan yang ada dengan cara Membentuk Pos Pendidikan Dinas Pendidikan dalam masa darurat COVID-19 dapat membentuk Pos Pendidikan. Pos Pendidikan ini bertugas sebagai sekretariat penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan. Keanggotaan Pos Pendidikan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan media. Pos pendidikan ini merupakan bagian dari Gugus Tugas COVID-19 di daerah, Melakukan koordinasi secara daring dengan Kemendikbud melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

(PP/BP-PAUD Dikmas) terkait pelaksanaan kebijakan BDR, Melakukan pendataan di daerah, Pemerintah daerah wajib melakukan pendataan pelaksanaan BDR sesuai dengan format yang disediakan Kemendikbud melalui tautan <http://data.spab.kemdikbud.go.id>, Menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 di daerah, Melakukan penyebaran informasi dan edukasi pencegahan COVID-19 melalui grup media daring, radio, pengumuman keliling, serta menginformasikan perkembangan penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan kepada masyarakat, Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BDR oleh satuan pendidikan, serta Melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan BDR kepada Kemendikbud dan menginformasikan perkembangan BDR kepada masyarakat secara rutin. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran secara online.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggung jawaban atas peraturan yang telah dibuat sekaligus menguji kualitas seorang pemimpin atau suatu kebijakan yang tidak berpihak dengan golongan tertentu. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dari lembaga-lembaga “*Stakeholder*” akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

Dalam pelaksanaan daring dimasa pandemi, hal utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana memberikan pembelajaran yang sesuai dengan yang di harapkan, dengan memperhatikan sumber daya pengajarnya, teknologi yang digunakan dalam peroses pembelajaran.

Di samping Guru dan tenaga pendidikan, sekolah juga harus menyediakan platform pembelajaran daring yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemendikbud telah memberi beberapa pilihan platform pembelajaran daring yang bisa digunakan secara gratis. Selain itu, *platform open source* yang menyediakan fitur lebih lengkap seperti Moodle bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Pengelola pendidikan tentunya dapat memilih pola pembelajaran daring maana yang sesuai dengan kondisi masing-masing dengan tetap memperhatikan kualitas kegiatan belajar mengajar.

4. Koordinasi

Kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan terlihat pada besaran alokasi dana pendidikan dalam APBN, terus mengalami peningkatan. Hal menjadi indikasi adanya keseriusan pemerintah dalam memberikan jaminan tiap warga negara mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas. Untuk menumbuhkan mutu pendidikan yang baik maka perlu di lakukan koordinasi. Koordinasi dalam manajemen dan kepemimpinan sekolah adalah untuk menumbuhkan sikap egaliter, serta meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan di antara kepala sekolah maupun guru-guru dengan tetap menghargai kewajiban dan wewenang masing-masing. Tetapi, saat ini system pendidikan beralih ke system daring, maka koordinasi

antara guru dan kepala sekolah, guru dan pemerintah masi harus tetap berjalan dengan baik, meskipun tidak bertatap muka secara langsung.

Koordinasi akan berlangsung secara efektif apabila dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dari tahap awal sampai akhir pekerjaan, mengupayakan hubungan dan pertemuan-pertemuan di antara berbagai pihak yang terkait, serta mengembangkan keterbukaan sehingga jika terdapat perbedaan pandangan dapat didiskusikan dan dipecahkan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan Tata Kelola Dinas Pendidikan Di Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dikabupaten Jeneponto, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan :

1. Bentuk transparansi dalam dunia pendidikan adalah manajemen keuangan. Prinsip manajemen keuangan sendiri pada dasarnya transparansi harus diterapkan untuk kesejahteraan guru, sehingga dapat memajukan lembaga pendidikan.
2. Dinas pendidikan tetap dapat memantau system pendidikan yang ada dengan cara Membentuk Pos Pendidikan Dinas Pendidikan dalam masa darurat COVID-19 dapat membentuk Pos Pendidikan. Pos Pendidikan ini bertugas sebagai sekretariat penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan.
3. Dalam pelaksanaan daring dimasa pandemi, hal utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana memberikan pembelajaran yang sesuai dengan yang di harapkan, dengan memperhatikan sumber daya pengajarnya, teknologi yang digunakan dalam peroses pembelajaran
4. Koordinasi akan berlangsung secara efektif apabila dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan dari tahap awal sampai akhir pekerjaan, mengupayakan hubungan dan pertemuan-pertemuan di antara berbagai pihak

yang terkait, serta mengembangkan keterbukaan sehingga jika terdapat perbedaan pandangan dapat didiskusikan dan dipecahkan bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di kemukakan, maka berikut ini di kemukakan saran atau masukan :

1. Pemerintah atau instansi lebih memperhatikan lagi system pendidikan yang ada saat ini, apalagi dimasa pandemi Covid-19 seperti ini jangan sampai lalai dari pengawasan sehingga banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya
2. Dalam upaya pelaksanaan proses belajar mengajar secara online atau daring, seharusnya pemerintah mempersiapkan secara lengkap semua kebutuhan yang akan di pergunakan untuk menunjang pelaksanaan belajar secara daring.

Muhardi, 2005 'Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia.<<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/153/pdf>>. Di akses pada tgl 19 november 2020

Nana Syaodih Sukmadinata Dkk,2006. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah; Konsep, Prinsip, dan Instrument*, Bandung: PT Refika Aditama

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Nugraha, Andi. 2020. *Hambatan, Solusi dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 Oleh Guru Sekolah Dasar*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 10 No. 3. Diakses pada 19 November 2020

Pedoman MBS, Depag RI Direktorat jenderal kelembagaan Agama Islam, 2005: Jakarta

Santosa, Panji. 2010. *Administrasi Publik. "Teori dan Aplikasi Good Governance"*.Bandung: Refika Aditama.

Serdamayanti, 2004. "*Good Governance (keperintahan yang baik) bagian kedua: Membangun Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*,Bandung: Mandar Maju.

W. J. S. Poerwadarminta, 1989. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Sumber Lain

BAPENAS, 2008) Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang baik

Umaedi, MPMBS, ([http://www.geocities. Com/pengembangan madrasah](http://www.geocities.com/pengembangan%20madrasah) diakses 20 November 2020)

<http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/04/definisi-pemerintahan.html>

RIWAYAT HIDUP



Wisdam Nofanda Gunawan, lahir pada tanggal 28 November 1998, di Jakarta Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Penulis merupakan Anak Kedua dari 4 bersaudara, dari pasangan Drs. M. Gunawan, Bsw dan Lindawati Gunawan. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD Negeri 1 Balang pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2010.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Jeneponto dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat di SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Jeneponto dan tamat pada tahun 2016, dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui seleksi penerimaan Mahasiswa Baru. Pada tahun 2021 penulis mendapatkan gelar S1 jurusan Ilmu Pemerintahan dengan judul Tata Kelola Dinas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kabupaten Jeneponto. Semoga dengan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di Masyarakat apa yang penulis dapatkan selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.